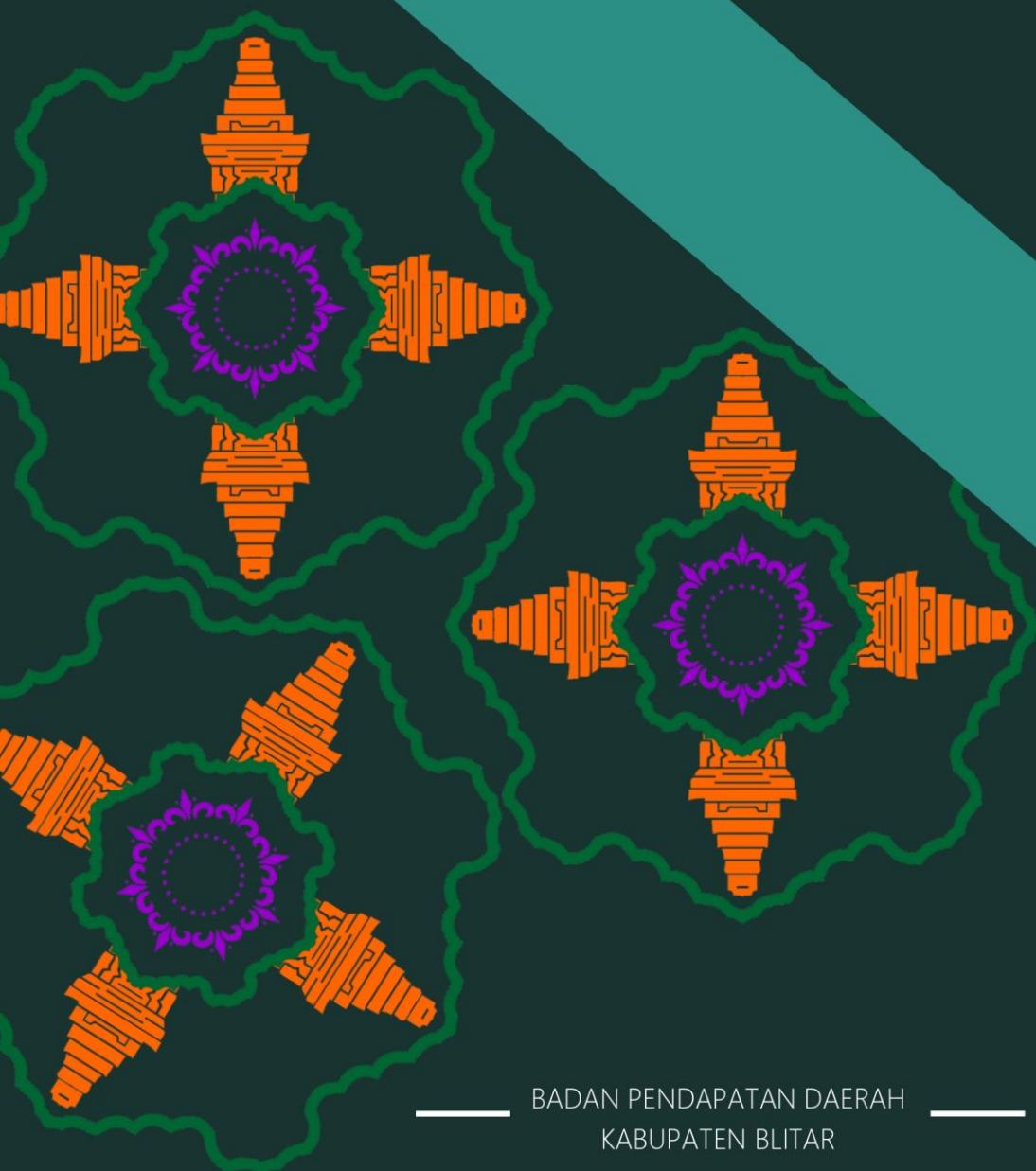


Bapenda
juara



RENJA 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

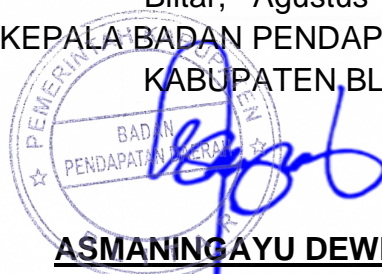
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

Renja PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar, yakni “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun,Toyyibatun, Warobbun Ghofur“. Dengan demikian, dokumen Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2024 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Blitar, Agustus 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI L., ST, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ..	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5. Penelahaan Usulan Program dari Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	29
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	34
BAB V PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka melaksanakannya, maka Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Kinerja dalam menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Blitar bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pengertian sebagai berikut:

- Transparan, yaitu terbuka dalam memberikan informasi terhadap masyarakat yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- Responsif, yaitu cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat.
- Efisien, yaitu melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat serta memaksimalkan sumber daya yang ada.
- Efektif, yaitu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan agar memperoleh hasil yang maksimal.

- Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.
- Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara mencapainya.
- Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor pendapatan, gender, dan usia.
- Berwawasan lingkungan, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan.
- Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan depan.

RENJA-PD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar tahun 2024 disusun dengan beberapa tahapan, meliputi, Persiapan Penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Perumusan Rancangan Akhir Renja, Penetapan Renja.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja-PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja-PD untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penunjang Keuangan Daerah Sub Urusan Pendapatan Daerah dengan spesialisasi pada bidang perpajakan serta sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayan publik yang berkaitan dengan pajak, maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara vertikal, horizontal maupun hubungan dengan masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan membangun konsep atau ide yang nantinya akan menjadi inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Serta optimalisasi penggalan potensi pajak daerah dengan mematangkan perencanaan yang dimiliki untuk meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada tema, prioritas pembangunan Kabupaten Blitar dan isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi pajak daerah yang dimiliki untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah Tahun 2021-2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Kabupaten Blitar tahun 2022 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

RENJA-PD ini dimaksudkan bagian dari perencanaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak daerah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah agar penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dapat memperoleh hasil secara optimal sesuai dengan pokok ketetapan, atau sekurang-kurangnya dapat memenuhi target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendapatan Tahun 2024 diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga perlu adanya evaluasi pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2021-2024, maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dituangkan pada Renstra-PD.

Secara Umum Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat sampai dengan tahun 2024 Bapenda Kabupaten Blitar, selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 2.1 sebagai berikut**

Tabel T-2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d Tahun 2026
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Usuran Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Bidang Urusan Keuangan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan Aparatur	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub.Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	44 orang	38 Orang	44 Orang	38	86,3	44 Orang	38 Orang	86,3%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	44 Orang	38 Orang	44 Orang	38	86,3	44 Orang	38 Orang	86,3%
3	Kegiatan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan	8 jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Pelayanan	100%
	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis Instalasi	100%
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100,0%	12 Jenis	12 Jenis	100%

		Sub. Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	12 Jenis	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang Cetak dan Penganggaran yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	4 eksemplar	4 eksemplar	4 eksemplar	4 eksemplar	100%	4 Eksemplar	4 Eksemplar	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material yg disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahKoordinasi dan Kosnultasi yang dilaksanakan	8 kali	4 kali	8 kali	4 kali	50%	8 kali	8 kali	50%
4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Barang	2 unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
		Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	2 Unit	100%
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	2 Unit	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	100 persen	100 persen	100	150	100%	100 Persen	100	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrk	Jumlah rekening yang dibayar	2 Rekening	2 rekening	2 Rekening	2 rekening	100 %	2 Rekening	2 Rekening	100%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelaksana yang dibayar	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	6 Orang	100%
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Jenis Barang yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabtan /Operasional/ lapangan yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100 %	9 Unit	9 Unit	100%
		Sub.Kegiatan Pemeliharaan Paralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 unit	5 Unit	100%
		Sub.Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%
7		Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub.Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti	44 Orang	0	44 Orang	0	0	44 Orang	0 Orang	0%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	15 %	11,09%	15 %	11.09%	73 %	15%	15%	73 %
1		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan pajak Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub.Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumenPerencanaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Sub. Kegiatan Analisa dan	Jumlah Dokumen Kebijakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen	2 Dokumen	100%

	Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Daerah	yang disusun /direview								
	Sub.Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan daerah	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100, %	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis sarana prasarana yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,1%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub. Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang dilakukan Pendataan	2 Obyek Pajak	2 Obyek pajak	2 Obyek pajak	2 Obyek pajak	100%	2 Obyek pajak	2 Obyek pajak	100%
	Sub.Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Jenis Data pajak yang dilakukan Pendataan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Sub.Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang dilakukan Penilaian	5 Obyek pajak	1 Obyek pajak	5 Obyek Pajak	1 Obyek Pajak	20%	5 Obyek Pajak	1 Obyek	20%
	Sub.Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Surat Keteapan Pajak Daerah	780.000 SKPD	760.000 SKPD	780.000 skpd	760.000 skpd	97,4%	780.000 skpd	780.000	97.4%
	Sub.Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan Konsultasi	50 Kali	50 kali	50 kali	50 kali	100%	50 kali	50 kali	100%
	Sub.Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	- Jumlah dokumen yg dilaksanakan penelitian dan verifikasi	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
	Sub. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan	780.000 wp	760.000 wp	780.000 wp	760.000 wp	97,4%	780.000 WP	760.000 WP	97,4%
	Sub. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keputusan yang dikeluarkan	100berkas	50berkas	100 berkas	50 berkas	50 %	100 berkas	100 Berkas	50%
	Sub. Kegiatan Penegendalian ,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase rekom yang dikeluarkan	100 Rekom	50 rekom	100 rekom	50 rekom	50 %	50 Rekom	50 Rekom	50%
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 kali	100%

Dari tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d Tahun 2024 Kabupaten Blitar dapat disimpulkan, seluruh program atau kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 tingkat capaian outputnya rata-rata diangka 100%. Namun untuk di tahun 2023, terdapat permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar yang mungkin berakibat pada capaian PAD lebih rendah dari tahun sebelumnya. Berikut beberapa permasalahan yang ada:

1. Adanya pemahaman baru bahwa yang dapat ditarik pajaknya hanya objek pajak yang telah memiliki izin, sehingga kecepatan penerimaan pajak daerah lainnya terkendala, tidak atau belum adanya izin yang tidak semua kewenangan izinnya berada di Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), adanya penurunan harga patokan MBLB di wilayah Jawa Timur yang baru sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur tentang penetapan harga patokan MBLB. Rata-rata penurunan harga patokan sekitar 50%, sehingga target diturunkan kurang lebih 50%. Pemungutan Pajak MBLB di Kabupaten Blitar, dikenakan terhadap Objek Pajak yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah 33 IUP. Sesuai dengan surat edaran dari kementerian ESDM, bahwa terdapat 15 Objek Pajak MBLB yang sudah memiliki IUP Eksplorasi, akan tetapi Bapenda belum bisa melaksanakan pemungutan pajak karena belum ada IUP Produksi yang keluar.
3. Hilangnya beberapa jenis retribusi sebagai konsekuensi penerapan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dipastikan mempengaruhi angka capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis retribusi yang tidak lagi boleh dipungut adalah :
 - a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- b. Retribusi pemakaian alat (Tera ulang)
- c. Retribusi Pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya sejenis.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati Blitar dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan penunjang keuangan sub urusan pendapatan daerah khususnya bidang pajak, dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Blitar, dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar, dalam melaksanakan tugasnya dimaksud Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perpajakan dan Pendapatan Daerah.
- b. Memimpin Pelaksanaan Tugas Dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan Daerah.
- c. Melaksanakan pemantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan Pendapatan Daerah.
- d. Mengkoordinasi Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan urusan penunjang keuangan sub urusan pendapatan daerah khususnya bidang pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah 72 (Tujuh Puluh Tiga) orang PNS dan Tenaga Kontrak yang tersebar pada seluruh 4 Bidang dan 1 Sekretariat yang ada di Badan Pendapatan Daerah.

Dengan Komposisi jumlah PNS sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang dan tenaga kontrak sejumlah 34 (tiga puluh empat) Orang dan didukung oleh adanya sumber pendanaan juga prasarana yang tersedia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan urusan penunjang keuangan sub urusan pendapatan daerah khususnya bidang pajak yang salah satunya yaitu melalui pelayanan penerimaan pajak daerah, Badan pendapatan Daerah kabupaten Blitar, menggunakan program aplikasi:

1. Sirido-aja (sistem informasi data online pajak daerah)
2. e-pada (elektronik pajak daerah)
3. e- sptpd (elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

yang pada dasarnya sistem ini dikembangkan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah pengurusan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah
- b. Dengan sistem aplikasi dan digitalisasi yang mencakup semua kegiatan akan lebih mempermudah serta memperlancar sistem administrasi dan juga pelaporan untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel.
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang terbatas.
- d. Membangun satu sistem kinerja yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di bidang perpajakan.

Tinjauan Evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Blitar Tahun 2022 dilakukan dengan mengukur capaian indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan atas dasar unsur Pelaksana fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan Bapenda Kabupaten Blitar.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan daerah kabupaten Blitar dalam kurung waktu terakhir dapat dilihat di table 2.2 terlampir.

Tabel T-2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 s/d 31 Juli	Tahun 2024	
1.	Indeks Kepuasan Aparatur	N/A	---	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2.	pendapatan asli daerah	N/A	penerimaan pajak daerah	92.731.215.431,91,-	114.743.250.000,00-	130.802.445.232,00,-	135.018.539.101,50	105.284.952.677,03	123.608.401.410,92	56.338.630.802,12	135.018.539.101,50	
			penerimaan pendapatan asli daerah	314.832.381.947,12,-	354.718.788.878,09,-	383.365.510.540,00,-	379.309.319.378,36	407.530.973.690,43	422.738.491.399,68	178.234.009.350,77	379.309.319.378,36	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra-PD, sasaran jangka menengah pada Renstra-PD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Berkenaan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar, berikut isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah :

1. Adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan tugas
2. Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal cukup baik
3. Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana
4. Kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah
5. Belum akuratnya data potensi pajak daerah
6. Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah
7. Sarana dan prasarana belum bisa mendukung pengelolaan potensi pajak dan jangkauan pelayanan pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Blitar
8. Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal
9. Dukungan teknologi informasi
10. Komitmen / dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD
11. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan
12. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali
13. Semakin luasnya jangkauan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar
14. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
15. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima
16. Kerjasama dengan stakeholders dalam pemungutan pajak daerah

17. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak
18. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya pemungut pajak
19. Lemahnya sanksi hukum
20. Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat
21. Adanya intervensi dari non stakeholders

Dampak dari Isu-Isu tersebut jika tidak segera diselesaikan atau dicarikan solusi, maka dapat menghambat atau mempengaruhi proses pembangunan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Maka dari itu, dibutuhkan strategi dalam memecahkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berdasarkan isu-isu tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) yang merupakan faktor internal dari Perangkat Daerah, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar:

A. Kekuatan (*Strength*):

1. Adanya regulasi sebagai dasar
2. Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal cukup
3. Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana

B. Kelemahan (*Weakness*):

1. Kurangnya SDM yang terampil
2. Belum akuratnya data potensi pajak daerah
3. Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah
4. Sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak) belum optimal

C. Peluang (Opportunity):

1. Dukungan teknologi informasi
2. Komitmen / dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD
3. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan
4. Adanya potensi pendapatan
5. Semakin luasnya jangkauan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
7. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima
8. Kerjasama dengan stakeholders dalam pemungutan pajak daerah

D. Ancaman (Threat) :

1. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
3. Lemahnya sanksi hukum
4. Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat
5. Adanya intervensi dari non stakeholders

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yaitu;

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan keahlian dan keterampilan.
3. Optimalisasi pendukung pendapatan daerah melalui pengembangan sistem informasi.
4. Terus menggali dan mencari potensi pendapatan daerah yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh

program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah telah terakomodir didalamnya.

Rencana pembangunan daerah dapat kita lihat dari visi Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai pondasi pelaksanaan pembangunan. Visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026 yaitu: "TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AHKLAK MULIA, BALDATUN TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR".

Upaya pencapaian visi tersebut didukung dengan 4 misi dan 5 panca bhakti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar. Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan Iman dan Takwa dengan kearifan lokal budaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kab Blitar.
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel inovatif dan berintegritas.
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung Misi Bupati Blitar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menjalankan misi yang ketiga yaitu “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel inovatif dan berintegritas”.

Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar maka pada tahun 2024 program dan kegiatan yang sudah direncanakan secara umum telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar dapat dilihat di **table 2.4 sebagai berikut :**

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program	85%	6.747.173.760,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program	85%	6.747.173.760,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	-	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	2 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perangkat Daerah	2 dokumen	-	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	-	5.743.377.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	-	5.743.377.800,00	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	44 orang	5.341.897.800,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	44 orang	5.341.897.800,00	

			Tunjangan ASN					Tunjangan ASN			
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44 orang	401.480.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44 orang	401.480.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	-	428.535.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	-	428.535.000,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5 paket	5.000.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	150.000.000,00	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	10.000.000,00	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	2 paket	21.680.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	2 paket	21.680.000,00	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	100.000.000,00	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	7.230.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	7.230.000,00	
7.	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	-	-	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	-	-	
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	134.625.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	134.625.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan		30.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan		30.000.000,00	

			Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran					Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 unit	30.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 unit	30.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa Penuunjnag Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu		288.396.960,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa Penuunjnag Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu		288.396.960,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	12 laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	12 laporan	5.000.000,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	126.054.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	126.054.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyedean jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	157.342.960,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyedean jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	157.342.960,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah Penunjnag Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	100 %	256.864.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah Penunjnag Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	100 %	256.864.000,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	161.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	161.000.000,00	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya		Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	45.864.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya		Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	45.864.000,00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	

Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	-	-	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	-	-
1	Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	-		Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	-	-
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	15% 100% 15%	6.656.338.040,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	15% 100% 15%	6.656.338.040,00
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	100%	6.656.338.040,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	100%	6.656.338.040,00
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	75.000.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	75.000.000,00
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	2 dokumen	400.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	2 dokumen	400.000.000,00
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22 laporan	623.476.600,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22 laporan	623.476.600,00
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	1.242.164.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	1.242.164.000,00
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	2 laporan	1.200.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	2 laporan	1.200.000.000,00
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan ,Pemeliharaan dan	10 laporan	900.152.956,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan ,Pemeliharaan dan	10 laporan	900.152.956,00

			Pelaporan basis data Pajak Daerah					Pelaporan basis data Pajak Daerah				
7.	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	5 Obyek Pajak	300.000.000,00			Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	5 Obyek Pajak	300.000.000,00		
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	780.200 dokumen	200.000.000,00			Penetapan Wajib Pajak Daerah	780.200 dokumen	200.000.000,00		
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50 layanan	40.000.000,00			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50 layanan	40.000.000,00		
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	-	-			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-		
11.	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	780.200 dokumen	1.194.086.970,00			Penagihan Pajak Daerah	780.200 dokumen	1.194.086.970,00		
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	-	-			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-		
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	100 dokumen	220.457.514,00			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100 dokumen	220.457.514,00		
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4 laporan	261.000.000,00			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	261.000.000,00		
	TOTAL				Rp.13.403.511.800,00			TOTAL				Rp.13.403.511.800,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Badan Pendapatan Daerah. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan digitalisasi pelayanan namun tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 tidak ada. Berikut kami sajikan **tabel 2.5 terlampir**.

Tabel T-C.2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan teradap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Visi Indonesia di tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan 9 (sembilan) Misi untuk mencapai visi tersebut terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, tema prioritas pembangunan di tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Blitar adalah “Memantapkan Produktivitas Ekonomi Yang Berorientasi Ekspor

Dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infrastruktur Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial-Politik”. Sedangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar;
2. Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta Penguatan Perlindungan Sosial;
3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak.

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 untuk Urusan Keuangan Daerah (Badan Pendapatan Daerah) mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada beberapa sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang dihilangkan dan dipastikan akan mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar. Sehingga diperlukan suatu pemikiran yang brilian untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih baik/ tinggi, minimal sama dengan tahun yang lalu.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Pada saat ini yang menjadi program

prioritas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Blitar. Tujuan tersebut dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Blitar adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Renja mengacu pada tujuan sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yakni Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dengan indikator sasaran :

- a. Peningkatan Persentase Pajak terhadap Total Pendapatan
- b. Nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Tema pembangunan di Tahun 2024 untuk RKPD Kabupaten Blitar Memantapkan produktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, Infrastruktur berkelanjutan, dan stabilitas sosial politik sebagai kerangka kerja dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam pembangunan sektor keuangan daerah, maka disusunlah program kerja kegiatan pokok agar tujuan sasaran strategis dapat tercapai. Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan 2 program, 8 Kegiatan, dan 34 Sub kegiatan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/ Material
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Daya Air dan Listrik' Komunikasi, Sumber
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga;
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penvusunan Kebiasaan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- k. Penagihan Pajak Daerah
- l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m. Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan Pajak Daerah
- n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Dalam menjalankan program dan kegiatan sangat diperlukan sebuah tujuan sebagai pedoman, sedangkan tujuan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, yaitu :

“ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah “

Adapun anggaran yang dibutuhkan berdasarkan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2024 untuk mendukung program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp.13.403.511.800,00** (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan pendapatan Daerah kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan maju tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 terlampir.

Dalam Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021- 2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam

program/kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 **tabel 4.1 terlampir.**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan				13.403.511.800,00				16.638.493.423,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program		85%	6.747.173.760,00			85%	9.606.981.823,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	-	APBD KAB		95	15.000.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	2 dokumen	-	APBD KAB		2 dokumen	7.500.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 dokumen	-	APBD KAB		2 dokumen	7.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Bapenda	-	5.743.377.800,00	APBD KAB		100%	8.655.332.573,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang	5.341.897.800,00	APBD KAB		44 orang	8.422.697.573,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 orang	401.480.000,00	APBD KAB		44 orang	232.635.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntable	Bapenda	-	428.535.000,00	APBD KAB		90%	406.349.000,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	5 paket	5.000.000,00	APBD KAB		5 jenis	12.500.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	12 paket	150.000.000,00	APBD KAB		12 jenis	12.500.000,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	2 paket	10.000.000,00	APBD KAB		2 jenis	27.050.000,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang	Bapenda	2 paket	21.680.000,00	APBD KAB		2 jenis	17.500.000,00

		dsediakan							
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda	5 paket	100.000.000,00	APBD KAB		5 jenis	97.500.000,00
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bapenda	4 dokumen	7.230.000,00	APBD KAB		4 eks	7.500.000,00
7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB		2 jenis	6.500.000,00
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	134.625.000,00	APBD KAB		8 kali	231.799.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		30.000.000,00	APBD KAB		100%	75.000.000,00
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bapenda	2 unit	30.000.000,00	APBD KAB		2 unit	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		288.396.960,00	APBD KAB		100%	314.500.250,00
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 laporan	5.000.000,00	APBD KAB		12 laporan	7.000.000,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	126.054.000,00	APBD KAB		12 laporan	132.500.250,00
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	157.342.960,00	APBD KAB		12 laporan	175.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	256.864.000,00	APBD KAB		100%	230.800.000,00
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	9 unit	161.000.000,00	APBD KAB		10 unit	100.800.000,00
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Bapenda	5 unit	45.864.000,00	APBD KAB		5 unit	65.000.000,00
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	50.000.000,00	APBD KAB		1 unit	70.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 Persen	440.000.000
1	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Bapenda	-	-	APBD KAB		44	440.000.000

	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah		15% 100% 15%	6.656.338.040,00			15% 100% 15%	7.031.511.600,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	6.656.338.040,00	APBD KAB		100%	7.031.511.600,00
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	75.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	150.000.000,00
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	2 dokumen	400.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	400.000.000,00
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	22 laporan	623.476.600,00	APBD KAB		22 kecamatan	62.347.600,00
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 unit	1.242.164.000,00	APBD KAB		3 jenis	1.342.164.000,00
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	2 laporan	1.200.000.000,00	APBD KAB		3 obyek pajak	725.000.000,00
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan ,Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	900.152.956,00	APBD KAB		10 jenis	610.000.000,00
	7. Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	5 Obyek Pajak	300.000.000,00	APBD KAB		5 obyek pajak	250.000.000,00
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	200.000.000,00	APBD KAB		780.200 SKPD	625.000.000,00
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	50 layanan	40.000.000,00	APBD KAB		50 kali	75.000.000,00
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB		100	75.000.000,00
	11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	1.194.086.970,00	APBD KAB		780.200 dokumen	4.527.000.000,00
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 berkas	75.000.000,00
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	100 dokumen	220.457.514,00	APBD KAB		100 rekom	125.000.000,00
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	4 laporan	261.000.000,00	APBD KAB		4 laporan	625.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 ini, dengan tujuan untuk menentukan acuan dan arah pembangunan di bidang pendapatan Kabupaten Blitar. Penyusunan ini tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Renja – PD ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ikut terapresiasi dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap program kerja yang direncanakan. dan hal-hal yang perlu digaris bawahi terkait pengoptimalan Penerimaan pendapatan antara lain:

1. Peningkatan pelayanan yang lebih efisien dengan dukungan aplikasi dan tenaga pelaksana yang terampil dibidangnya.
2. Perbaikan Data base Pajak yang lebih akurat akan berpengaruh pada penerimaan Pajak Daerah.
3. Kegiatan rekonsiliasi pajak dilaksanakan secara regular agar piutang pajak dapat dikurangi.
4. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak melalui edukasi, sosialisasi dan konsultasi.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

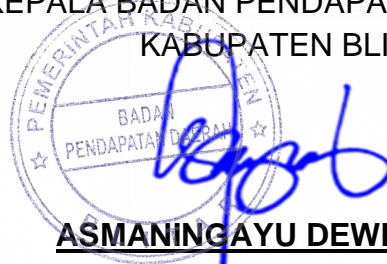
Selain upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal dilaksanakan, juga dilaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut penyelesaian

permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan kegiatan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar, meliputi ;

1. Bekerjasama dengan instansi terkait (APH) dalam penyelesaian Piutang dari tahun ketahun yang semakin bertambah.
2. Melibatkan Pihak ketiga dan aparatur wilayah dalam hal penyelesaian masalah Basis data pajak yang belum akurat dan valid.
3. Pengembangan Teknologi digitalisasi dalam rangka mendukung Penerimaan daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Mensinergikan program dan kegiatan untuk menciptakan kolaborasi dengan stakeholder terkait, guna mencapai tujuan peningkatan PAD.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Blitar, Agustus 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

The image shows a circular official stamp of the Regional Revenue Office of Blitar Regency. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR" around the top edge and "BADAN PENDAPATAN DAERAH" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

ASMANINGAYU DEWI L.,ST,MM

Pembina Tingkat I

Nip.19780426 200212 2 011